

TINJAUAN UMUM

Tim Penulis Analisis Triwulanan Bank Indonesia

Selama triwulan I-2005, kinerja perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan yang membaik. Kestabilan makroekonomi tetap terjaga meskipun terdapat tekanan terhadap nilai tukar dan inflasi yang cenderung meningkat. Kegiatan ekonomi terus meningkat lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga telah didukung dengan pola ekspansi yang lebih berimbang. Laju inflasi dalam triwulan I-2005 menunjukkan peningkatan yang terutama terkait dengan kenaikan BBM. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiasi. Sementara itu, perkembangan sektor keuangan khususnya perbankan dan pasar modal menunjukkan kinerja yang semakin meningkat sehingga peranannya dalam mendukung kegiatan ekonomi semakin besar.

Perekonomian Indonesia triwulan I-2005 diperkirakan tumbuh sebesar 5,0% - 5,5% (yoy) sesuai dengan perkiraan semula. Pertumbuhan tersebut dicapai dengan pola ekspansi yang lebih berimbang, dengan peran investasi semakin meningkat. Peningkatan investasi ini telah mendorong meningkatnya impor terutama untuk impor bahan baku dan barang. Sementara itu, ekspor masih tumbuh positif meskipun terbatas dan lebih bertumpu pada komoditas berbasis sumber daya alam dan produk industri yang terkait dengan hasil pertanian. Di sisi eksternal, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I-2005 masih sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Transaksi berjalan masih mengalami surplus, terutama karena adanya peningkatan kinerja ekspor. Namun lalu lintas modal mengalami defisit terutama disebabkan oleh tingginya pembayaran utang luar negeri. Dengan perkembangan tersebut posisi cadangan devisa menjadi sebesar USD36 miliar.

Tekanan inflasi meningkat cukup tinggi pada triwulan I-2005 hingga inflasi IHK tercatat sebesar 8,81% (yoy). Tingginya inflasi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan meningkatnya ekspektasi inflasi masyarakat sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan harga BBM serta melemahnya nilai tukar. Berdasarkan kelompok barang, peningkatan inflasi tersebut terutama didorong kenaikan harga jasa transportasi dan komunikasi yang sebagian besar merupakan dampak ikutan dari kenaikan harga BBM.

Nilai tukar rupiah selama triwulan I-2005 mengalami tekanan depresiatif namun dengan volatilitas yang relatif rendah. Rata-rata nilai tukar rupiah pada triwulan I-2005 tercatat sebesar Rp9.279 per dolar AS. Kecenderungan pelemahan rupiah tersebut akibat dari tingginya permintaan valas domestik yang belum diimbangi oleh pasokan valas yang memadai. Di sisi permintaan, tingginya permintaan terkait dengan meningkatnya impor untuk kebutuhan investasi dan konsumsi, melonjaknya kebutuhan valas oleh perusahaan BUMN karena kenaikan harga minyak dunia, dan indikasi percepatan pembayaran utang luar negeri swasta. Sementara itu, pasokan valas masih relatif terbatas terutama akibat aliran devisa hasil ekspor yang belum optimal, aliran modal masuk masih terbatas dan didominasi oleh *portfolio investment*, serta sebagian devisa migas masuk ke cadangan devisa.

Di sektor keuangan, secara umum stabilitas sistem keuangan khususnya perbankan tetap terpelihara. Selama triwulan laporan tidak terdapat gejala yang berarti terhadap sistem perbankan meskipun dalam bulan Januari 2005 terdapat pencabutan ijin usaha satu bank umum. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional juga terpelihara dengan baik. Sejalan dengan itu, kinerja perbankan nasional sampai dengan triwulan I-2005 cukup baik antara lain tercermin dari peningkatan aktiva produktif termasuk kredit, serta perbaikan profitabilitas dan permodalan. Di sisi lain, risiko-risiko yang dihadapi perbankan, khususnya risiko likuiditas dan risiko pasar masing-masing berada pada level rendah dan moderat dengan arah yang stabil serta telah dimitigasi secara memadai. Risiko kredit masih cukup tinggi yang tercermin dari tingginya kredit bermasalah (NPL) *gross* yang stabil pada level 6%. Namun demikian, perbankan telah membentuk cadangan kerugian yang memadai sehingga NPL *net* dapat dipertahankan pada level yang cukup rendah yakni 1,7%. Kredit yang diberikan selama triwulan I-2005 meningkat cukup besar yakni Rp6,8 triliun sehingga posisinya mencapai Rp601,8 triliun. Peningkatan kredit tersebut telah mendorong perbaikan profitabilitas perbankan yang ditunjukkan oleh ROA yang memadai sebesar 3,4%. Sementara itu, permodalan perbankan meningkat dari 19,4% menjadi 22,0% yang merupakan level tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Patut dikemukakan, selama triwulan laporan terjadi penarikan/pelepasan reksadana (*redemption*) oleh masyarakat yang menyebabkan penurunan nilai aktiva bersih (NAB) dari Rp104,0 triliun pada akhir Desember 2004 menjadi Rp102,8 triliun pada akhir Maret 2005, meskipun NAB bulan Februari 2005 telah mencapai posisi tertinggi Rp113,17 triliun. Hal ini terutama didorong oleh ekspektasi yang berlebihan dari rencana penerapan *marked to market*, kenaikan suku bunga SBI, dan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan internasional. Dalam kaitan itu, menjelang akhir triwulan laporan Bank Indonesia telah berupaya melakukan upaya-upaya mengurangi dampak penurunan reksadana terhadap

kestabilan sistem keuangan antara lain untuk pertama kalinya dengan melakukan pembelian SUN. Langkah ini juga merupakan strategi memupuk SUN (*stock building*) sebagai instrumen alternatif OPT.

Ke depan, prospek ekonomi makro dalam triwulan II-2005 dan keseluruhan tahun 2005 masih akan membaik. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2005 dan keseluruhan tahun 2005 diperkirakan tetap berada dalam kisaran 5-6% (yoy) dengan pola ekspansi yang semakin berimbang. Sumber ekspansi perekonomian Indonesia akan bertumpu pada investasi dan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, dengan nilai tukar yang kompetitif dan *trend* harga komoditi terutama minyak yang masih menguntungkan Indonesia, neraca transaksi berjalan diperkirakan membaik. Arus modal swasta juga diperkirakan meningkat, sementara dampak dari persetujuan *debt moratorium* juga akan memperbaiki kinerja lalu lintas modal. Didukung oleh perbaikan kinerja neraca pembayaran, nilai tukar rupiah diperkirakan tetap bergerak stabil, meskipun terdapat kelemahan struktural dalam ketidakseimbangan *demand* dan *supply* valas. Laju inflasi diperkirakan akan mengalami sedikit peningkatan terutama karena perkembangan nilai tukar dan meningkatnya ekspektasi inflasi akibat kenaikan BBM.

Prospek ekonomi yang membaik tersebut masih dihadapkan pada sejumlah risiko yang dapat berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi makro ke depan. Pertama, perkembangan harga minyak dunia yang masih tinggi yang berdampak pada tekanan harga berbagai komoditas global akibat peningkatan ongkos produksi. Kondisi ini tidak saja menurunkan kemampuan ekonomi domestik dalam melakukan impor, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan harga melalui *imported inflation*. Kedua, ketergantungan perekonomian terhadap aliran *portfolio* asing jangka pendek yang sangat peka terhadap faktor ekspektasi jangka pendek. Ketiga, dampak ketidakseimbangan global yang dipicu oleh defisit neraca berjalan dan fiskal AS dapat menimbulkan risiko bagi kesinambungan pertumbuhan ekonomi dunia dan risiko ketidakstabilan pasar keuangan global.

Mempertimbangkan perkiraan ekonomi makro dan inflasi ke depan, kebijakan Bank Indonesia akan tetap diarahkan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi makro guna memelihara momentum pertumbuhan ekonomi yang ada. Sejalan dengan itu, kebijakan moneter yang cenderung ketat (*tight bias*) akan tetap dilanjutkan guna mengendalikan tekanan inflasi. Secara operasional, kebijakan tersebut ditempuh dengan melakukan penyerapan kelebihan likuiditas secara optimal yang memungkinkan kenaikan suku bunga secara bertahap dan terukur. Selain itu, untuk mendukung terpeliharanya kestabilan ekonomi ke depan, Bank Indonesia melakukan berbagai upaya antisipatif terhadap beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi makro khususnya nilai tukar dan inflasi. Untuk menjaga volatilitas nilai tukar rupiah, langkah sterilisasi/intervensi valas dilakukan secara

terukur yang diintegrasikan dengan berbagai langkah dalam memperbaiki struktur permintaan dan penawaran valas secara menyeluruh.

Di bidang perbankan, kebijakan akan diarahkan untuk melanjutkan stabilitas sistem perbankan yang telah ada dan mengakselerasi upaya-upaya untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan. Selain itu, Bank Indonesia akan melanjutkan juga upaya-upaya untuk mendorong peningkatan efektivitas *internal control* dan manajemen risiko bank, pembenahan *corporate governance* bank untuk meminimalkan risiko-risiko usaha, serta mendorong akselerasi proses konsolidasi industri perbankan melalui penyelesaian proses konsolidasi individual bank dalam tahun 2005.

I. EVALUASI PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAN INFLASI

I.1 Kondisi Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro triwulan I-2005 tetap menunjukkan kestabilan di tengah-tengah berlanjutnya ketidakseimbangan ekonomi global, meningkatnya harga minyak, dan pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara. PDB pada triwulan I-2005 diperkirakan tumbuh 5,0 – 5,5% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan pola ekspansi yang lebih berimbang dengan peran investasi yang semakin meningkat, khususnya investasi non bangunan. Konsumsi swasta diperkirakan tumbuh 3,8 – 4,3% (yoy) terutama dalam bentuk konsumsi bukan makanan yang didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat dan kemudahan pembiayaan untuk konsumsi. Investasi diperkirakan tumbuh sebesar 16,0 – 16,5% (yoy), dengan kontribusi pertumbuhan yang lebih tinggi dari konsumsi swasta dan peran investasi non bangunan yang lebih tinggi dari investasi bangunan. Sejalan dengan masih kondusifnya pertumbuhan ekonomi global, kinerja ekspor diperkirakan mencatat pertumbuhan 8,6 – 9,1% (yoy) yang terutama didorong peningkatan volume ekspor komoditas yang berbasis sumber daya alam. Impor diperkirakan tumbuh 18,0 – 18,5% dengan peningkatan volume impor terjadi pada hampir semua kelompok komoditas, terutama untuk kelompok bahan baku dan barang modal. Peningkatan impor barang modal maupun bahan baku tidak terlepas dari upaya peningkatan kapasitas terpasang sektor industri dalam memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

Di sisi penawaran, pertumbuhan PDB pada triwulan I-2005 disumbang khususnya oleh sektor-sektor utama penghasil barang dan jasa seperti sektor industri pengolahan, sektor bangunan, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Dengan perkembangan positif di sisi penawaran, kenaikan permintaan agregat ditengarai masih dapat dipenuhi oleh pasokan barang dan jasa, sehingga tekanan terhadap peningkatan harga dari sisi kesenjangan keluaran (*output gap*) masih bersifat minimal.

Di sisi eksternal, perkembangan NPI pada triwulan I-2005 menunjukkan perbaikan terutama didukung oleh kinerja ekspor, sebagai dampak dari tetap tingginya harga-harga komoditas internasional. Surplus transaksi berjalan diperkirakan meningkat hingga menjadi USD1,9 miliar. Sementara dari sisi lalu lintas modal secara neto terjadi peningkatan aliran masuk modal *portfolio* sehingga sedikit mengurangi perkiraan defisit. Dengan perkembangan tersebut, NPI secara keseluruhan mengalami defisit sehingga posisi cadangan devisa menjadi USD36,0 miliar atau setara dengan 5,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Tabel I.1. Indikator Ekonomi Makro

Indikator	2004				2005
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I
IHK (%)					
Triwulanan (<i>quarter to quarter</i>)	0,91	2,35	0,51	2,51	3,19
Tahunan (<i>year on year</i>)	5,11	6,83	5,06	6,40	8,81
PDB (% pertumbuhan, tahunan)					
<i>Dari sisi permintaan :</i>	4,38	4,38	5,10	6,91	5,0 – 5,5**
Konsumsi Total	6,15	5,22	4,04	3,12	3,2 – 3,7**
Investasi Total	11,50	13,10	19,09	18,29	16,0 – 16,5**
<i>Dari sisi produksi :</i>					
Pertanian	4,9	3,8	5,3	1,9	1,6 – 2,1**
Pertambangan	-7,0	-9,1	-5,0	3,3	-0,4 – 0,1**
Industri Pengolahan	6,0	6,9	4,8	7,2	5,5 – 6,0**
Sektor eksternal :					
Ekspor non migas (fob, % pertumbuhan tahunan)	-8,8	9,2	23,3	9,8	30,8****
Impor non migas (c&f, % pertumbuhan tahunan)	7,0	26,6	30,7	4,6	13,2****
Transaksi berjalan (juta USD)	-401	666	2.299	197**	1.922**
Posisi Utang LN (juta USD)	136.679	133.378	132.798	137.024	136.116****
Besaran Moneter (miliar RP)					
M0	142.817	155.466	175.351	199.446	184.878
M1	219.087	223.726	240.911	253.818	250.433****
M2	935.249	975.166	986.806	1.033.528	1.012.144****
Suku bunga (%)¹⁾					
SBI 1 bulan	7,42	7,34	7,39	7,43	7,44
PUAB (overnight)	5,87	4,24	4,13	3,76	7,47
Deposito 1 bulan	5,86	6,23	6,31	6,43	6,46****
Kredit modal kerja	14,61	14,10	13,80	13,41	13,37****
Kredit investasi	15,12	14,64	14,33	14,05	13,87****
Kurs (Rp/USD), nominal akhir periode	8.564	9.400	8.420	9.335	9.487
Real Effective Exchange Rate (REER)²⁾, 1995=100	97,46	92,12	94,74	91,19	93,75
Kurs rata-rata	8.469	9.005	9.163	9.120	9.279
1) Rata-rata tertimbang akhir periode					
2) REER adalah indeks nilai tukar rupiah per mata uang negara mitra dagang yang dibobot dengan total ekspor dan impor dari 8 mitra dagang utama Indonesia.					
* : Perkiraan Bank Indonesia menggunakan tahun dasar 2000					
** : Perkiraan Bank Indonesia					
*** : Angka Januari 2005					
**** : Angka Februari 2005					
Sumber : Bank Indonesia dan BPS (diolah)					

I.2 Inflasi

Tekanan inflasi meningkat cukup tinggi pada triwulan I-2005 mencapai 8,81% (yoy), sementara inflasi inti mencapai 7,17% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi terutama disebabkan oleh faktor non fundamental berupa kenaikan harga BBM dan bencana alam tsunami, serta faktor fundamental berupa ekspektasi inflasi yang telah meningkat sebelum dan sesudah diumumkannya rencana kenaikan harga BBM dan nilai tukar yang cenderung melemah. Sementara itu, perkembangan faktor fundamental lainnya yaitu tekanan inflasi dari interaksi antara permintaan dan penawaran secara umum masih minimal.

Berdasarkan kelompok barang, peningkatan inflasi tersebut terutama disumbang oleh inflasi kelompok jasa transportasi dan komunikasi yang sebagian besar diakibatkan oleh kenaikan harga BBM dan tarif angkutan. Kelompok barang lain yang mengalami inflasi cukup tinggi adalah kelompok makanan jadi sehubungan dengan kenaikan harga gula pasir dan rokok.

II. EVALUASI PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN MONETER

Secara umum, pelaksanaan kebijakan moneter dalam triwulan I-2005 menunjukkan bahwa berbagai upaya yang ditempuh Bank Indonesia masih dapat menjaga keseimbangan ekonomi makro. Kebijakan moneter tersebut pada dasarnya tetap diarahkan pada upaya untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi dengan mengendalikan faktor-faktor yang menjadi determinan utama penyebab meningkatnya inflasi yakni nilai tukar rupiah, permintaan domestik, dan ekspektasi inflasi. Secara operasional, *stance* kebijakan moneter yang ditempuh dalam triwulan I-2005 adalah kebijakan moneter yang cenderung ketat (*tight bias*). Kebijakan tersebut dilakukan dengan langkah penyerapan kelebihan likuiditas perbankan secara optimal yang memungkinkan adanya kenaikan suku bunga secara bertahap dan terukur.

Dalam perkembangannya, sejumlah indikator utama moneter menunjukkan bahwa secara umum kestabilan moneter dan keuangan pada triwulan I-2005 masih dapat terjaga. Uang primer (*base money*) berada di bawah kisaran sasaran indikatif yang ditetapkan dan suku bunga SBI 1 bulan meningkat tipis dibandingkan triwulan sebelumnya. Dampak kenaikan suku bunga SBI tersebut kurang terlihat dalam pembentukan suku bunga PUAB, deposito dan kredit. Suku bunga PUAB (O/N) menurun dan lebih *volatile* terkait dengan meningkatnya kebutuhan likuiditas bank khususnya untuk pembayaran pajak yang lebih tinggi dari yang diperkirakan. Sementara itu, suku bunga deposito hanya naik tipis, dan suku bunga kredit masih cenderung menurun. Meskipun demikian, perubahan minimal pada suku bunga instrumen tersebut dipandang cukup kondusif dalam mendorong pembiayaan domestik baik kredit perbankan maupun pasar modal. Kredit perbankan telah menunjukkan peningkatan dalam dua bulan pertama 2005, sedangkan

IHSG sempat mencatat *level*/tertinggi 1.150. Namun, IHSG terkoreksi pada akhir triwulan sebagai dampak aksi ambil untung investor yang didorong oleh naiknya suku bunga Fed, koreksi indeks saham di bursa regional dan pengumuman penurunan keuntungan tahun 2004 dari beberapa perusahaan domestik.

Sejalan dengan kebijakan moneter yang *tight bias* dan langkah penyerapan likuiditas yang secara optimal dilakukan Bank Indonesia, suku bunga SBI naik secara bertahap dengan level yang terbentuk sejalan dengan upaya pencapaian sasaran inflasi jangka menengah panjang. Lelang SBI pada triwulan I-2005 secara umum telah menyerap likuiditas secara optimal dengan dampak ke suku bunga yang relatif minimal. Suku bunga SBI 1 bulan tercatat naik 1 bps menjadi sebesar 7,44% dari akhir triwulan lalu sebesar 7,43%, sementara SBI 3 bulan naik 2 bps menjadi sebesar 7,31% dari akhir triwulan lalu sebesar 7,29%. Di sisi lain, suku bunga perbankan masih bergerak dengan arah yang berbeda dan dengan kecepatan yang menurun. Suku bunga deposito relatif stabil di posisi 6,46%, hanya naik tipis sebesar 3 bps dari triwulan sebelumnya, atau melambat dari kenaikan di triwulan lalu (12 bps) kendatipun ruang dari sisi penjaminan masih cukup lebar. Suku bunga kredit masih menurun secara lebih terbatas dan masih didominasi oleh penurunan suku bunga kredit konsumsi. Suku bunga kredit modal kerja (KMK) stabil di 13,37%, suku bunga kredit investasi (KI) menurun 18 bps menjadi 13,87%, suku bunga konsumsi (KK) menurun 34 bps menjadi 16,23% .

Nilai tukar rupiah selama triwulan I-2005 mengalami depresiasi secara perlahan (*gradual depreciation*) namun volatilitasnya tercatat masih relatif rendah. Kecenderungan pelemahan rupiah diatas merupakan akibat dari tingginya permintaan valas domestik yang belum diimbangi oleh pasokan valas yang lebih berkesinambungan. Di sisi permintaan, tingginya permintaan terkait dengan meningkatnya impor untuk kebutuhan investasi dan konsumsi, melonjaknya kebutuhan valas oleh perusahaan BUMN karena kenaikan harga minyak dunia, dan indikasi percepatan pembayaran utang luar negeri swasta. Di sisi pasokan, aliran devisa hasil ekspor masih belum optimal, aliran modal masuk masih terbatas dan didominasi oleh *portfolio investment*, serta sebagian devisa migas (untuk Pemerintah) masuk ke cadangan devisa. Dengan perkembangan tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah pada triwulan I-2005 tercatat sebesar Rp9.279 per dolar AS atau terdepresiasi 1,7% dibanding triwulan sebelumnya.

III. EVALUASI PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN PERBANKAN

Selama triwulan I-2005, kebijakan perbankan tetap difokuskan pada berbagai langkah lanjutan dalam rangka mempertahankan stabilitas sistem perbankan guna menciptakan stabilitas sistem keuangan dan mendorong fungsi intermediasi perbankan. Kebijakan tersebut ditempuh

melalui dua kegiatan pokok yakni: (i) peningkatan efektivitas pengawasan bank antara lain melalui pemantauan terhadap berbagai aspek seperti risiko-risiko perbankan, persiapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaksanaan rencana bisnis bank, pemberian kredit baru dan kredit restrukturisasi terutama di bank-bank besar, dan rencana tindak bank-bank untuk perbaikan permodalan dan kualitas kredit; dan (ii) penyempurnaan pengaturan dan pengawasan bank mengacu pada Prinsip-prinsip Pokok Basel (*Basel Core Principles*).

Untuk memperkuat industri perbankan dan mendorong fungsi intermediasi perbankan tersebut, pada bulan Januari 2005 Bank Indonesia menerbitkan Paket Kebijakan Perbankan. Paket Kebijakan Januari 2005 tersebut merupakan kesinambungan dari rangkaian yang terintegrasi dengan rancangan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya khususnya dalam Bank Indonesia *Master Plan* dan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Paket kebijakan tersebut meliputi delapan Peraturan Bank Indonesia (PBI) masing-masing tentang Pinjaman Luar Negeri (PLN), Kualitas Aktiva, BMPK, Sekuritisasi Aset, Perlakuan Khusus Kredit di NAD dan Kabupaten Nias, Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Transparansi Produk Perbankan, dan Sistem Informasi Debitur. Penerapan paket kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan disambut positif oleh pasar.

Secara umum, sampai dengan triwulan I-2005 stabilitas sistem perbankan tetap terpelihara dengan baik. Hal tersebut terutama didukung oleh nilai tukar dan suku bunga yang relatif stabil, volatilitas yang terkendali di pasar modal serta kecukupan modal dan likuiditas perbankan. Risiko kredit perbankan masih cukup tinggi yang tercermin dari tingginya rasio kredit bermasalah (NPL) *gross* dan *net* yang cenderung stabil pada level 5,96% dan 1,74%. Namun demikian, perbankan telah membentuk cadangan kerugian (PPAP) yang memadai. Risiko likuiditas perbankan relatif rendah yang ditandai oleh kecukupan rasio alat likuid dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang sewaktu-waktu dapat ditarik nasabah yang berada di atas 100%. Sedangkan risiko pasar berada pada level moderat dan dapat dimitigasi dengan baik oleh perbankan dengan dukungan terkendalnya posisi devisa neto, relatif besarnya margin suku bunga dan kecukupan modal. Volatilitas nilai tukar khususnya yang terjadi diakhir triwulan I-2005, tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan khususnya perbankan karena terkendalnya posisi devisa neto dan memadainya modal bank-bank.

Sejalan dengan itu, selama triwulan I-2005 kinerja perbankan cukup baik dan stabil. Hal tersebut antara lain tercermin dari perbaikan beberapa indikator seperti peningkatan aktiva produktif termasuk kredit yang berhasil mendorong peningkatan profitabilitas dan permodalan. Dana pihak ketiga (DPK) perbankan menurun dibandingkan dengan posisi triwulan IV-2004. Penurunan DPK tersebut terutama disebabkan adanya pencairan deposito nasabah korporasi di beberapa bank besar, serta penarikan tabungan nasabah-nasabah kecil pada kantor-kantor cabang bank.

Sementara itu, industri perbankan syariah terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat seiring dengan besarnya potensi dan permintaan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan syariah. Dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan (PYD) yang dihimpun perbankan syariah tumbuh signifikan masing-masing 69,0% dan 72,5% sehingga *financing to deposit ratio* nya tetap tinggi yakni diatas 100%. Di sisi lain, BPR juga berkembang pesat yang ditandai dengan pertumbuhan DPK dan kredit masing-masing sebesar 30,5% dan 35% (yoy). Peningkatan kredit tersebut mendorong peningkatan LDR BPR dari 74,5% menjadi 79,5%.

Dalam jangka pendek, diperkirakan tidak terdapat potensi risiko yang dapat membahayakan sistem keuangan khususnya perbankan. Namun demikian, terdapat beberapa hal penting yang perlu diantisipasi agar tidak mengganggu stabilitas sistem perbankan. Terdapat potensi tekanan terhadap likuiditas perbankan sebagai dampak rencana pengalihan dana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari perbankan ke Bank Indonesia. Oleh karena itu, penerapan kebijakan tersebut perlu dilakukan secara bertahap. Sementara itu, penerapan skim penjaminan terbatas pasca pendirian Lembaga Penjamin Simpanan dapat menimbulkan potensi migrasi dana antar bank dan kemungkinan perpindahan dana (*flight to safety*) dari bank-bank kecil ke bank-bank besar khususnya BUMN. Untuk mengantisipasi hal itu, Pemerintah dan Bank Indonesia telah dan terus mensosialisasikan rencana penerapan skim penjaminan terbatas tersebut kepada perbankan dan masyarakat secara intensif. Sementara itu, persaingan yang semakin tinggi berpotensi mengancam kelangsungan usaha sebagian bank khususnya bank-bank kecil akan diantisipasi melalui kebijakan konsolidasi perbankan yang sedang dirumuskan oleh Bank Indonesia dan akan diakselerasikan implementasinya.

IV. EVALUASI PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

Di sisi pembayaran tunai, selama triwulan I-2005 kebijakan tetap diarahkan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar. Kebijakan tersebut ditempuh melalui peningkatan efektivitas distribusi/pengedaran uang kartal dan menanggulangi meluasnya uang palsu melalui penyempurnaan beberapa ketentuan terkait.

Beberapa indikator pengedaran uang kartal selama triwulan I-2005 menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jumlah uang kartal yang diedarkan (UYD) dalam triwulan I-2005 menurun 8,3% dari Rp126,9 triliun menjadi Rp116,4 triliun. Penurunan jumlah UYD disebabkan peningkatan pengaliran uang kartal ke sistem perbankan pasca periode hari raya keagamaan dan tahun baru.

Dilihat dari jumlah bilyet/keping uang kartal yang diedarkan Bank Indonesia, 90% merupakan uang pecahan Rp5.000 ke bawah, dan sisanya sebesar 10% merupakan uang kertas pecahan besar (Rp10.000 ke atas). Proporsi ini relatif tidak berubah dibandingkan posisi triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 89,5% dan 10,5%. Dari seluruh pecahan besar tersebut, uang yang paling banyak beredar di masyarakat adalah pecahan Rp50.000 dan Rp10.000 masing-masing sebesar 49,5% dan 19,7%.

Di sisi pembayaran non tunai, selama tahun 2004 kebijakan diarahkan pada upaya meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran di Indonesia. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai kegiatan antara lain pengawasan sistem pembayaran, pengembangan *Failure to Settle Scheme* (FtS) yakni skema/mekanisme mengatasi kegagalan peserta kliring dalam memenuhi kewajiban setelmen, dan penyelenggaraan bulan pengaduan konsumen pengguna alat pembayaran berbasis kartu dalam rangka penerbitan PBI tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Sementara itu, untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dilakukan pengembangan Sistem Kliring Nasional dan pengembangan Daftar Hitam Nasional.

Selama triwulan I-2005 perkembangan transaksi BI-RTGS menunjukkan penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai transaksi RTGS menurun 28,1% dari Rp6.729 triliun menjadi Rp4.840 triliun. Dari sisi volume transaksi menunjukkan peningkatan 17,6% dari Rp1.123 ribu menjadi 1.321 ribu transaksi. Perkembangan nilai maupun volume transaksi RTGS tersebut tidak terlepas dari perkembangan jumlah peserta dalam sistem ini. Dari sisi jumlah peserta, sampai dengan akhir triwulan I-2005 tercatat 250 peserta yang aktif dan 2 peserta dengan status *freeze*. Jumlah tersebut meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya yakni 231 peserta. Dari sisi nilai transaksi, Bank Indonesia merupakan pihak yang melakukan transaksi yang paling tinggi karena terkait dengan fungsi dan peran Bank Indonesia selaku pemegang kas negara maupun sebagai otoritas moneter serta penyelenggara sistem setelmen. Sementara dari sisi volume transaksi, bank umum swasta nasional (BUSN) merupakan pihak yang paling banyak melakukan transaksi khususnya terkait dengan tingginya aktivitas PUAB serta tingginya transfer dana untuk nasabah (masyarakat).

V. PERKIRAAN EKONOMI DAN MONETER

V.1 Perkiraan Ekonomi Makro

Perekonomian Indonesia pada triwulan II-2005 diperkirakan menunjukkan perkembangan yang membaik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada pada kisaran 5,0-6,0% (yoy) yang didukung oleh pertumbuhan permintaan domestik. Di sisi permintaan, pertumbuhan

investasi dan konsumsi swasta masih tetap kuat. Pertumbuhan konsumsi swasta masih didorong oleh meningkatnya pendapatan masyarakat, sementara perkiraan peningkatan investasi diantaranya diindikasikan oleh masih cenderung meningkatnya impor barang modal. Kondisi perekonomian global yang masih kondusif mendorong peningkatan pertumbuhan ekspor barang dan jasa walaupun sedikit melambat dibandingkan triwulan lalu.

Peningkatan sisi permintaan tersebut diiringi pula oleh meningkatnya sisi produksi barang dan jasa. Penyumbang utama masih bertumpu pada sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara itu, sektor bangunan dan sektor keuangan juga diperkirakan tumbuh cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Panen raya pada sektor pertanian juga menjadi salah satu faktor sehingga pertumbuhan ekonomi triwulan II-2005 diperkirakan mencapai 5,0% - 6,0%. Peningkatan kegiatan di sisi produksi tersebut mendorong meningkatnya tingkat penggunaan kapasitas khususnya di industri pengolahan dan sektor pertanian terutama industri alat angkut, tekstil dan makanan.

Perbaikan ekonomi di atas didukung pula oleh kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan II-2005 yang diperkirakan membaik. Perbaikan ini didorong oleh perkembangan harga komoditi dunia yang masih memadai, iklim investasi yang membaik, dan skema *debt moratorium* yang ditempuh Pemerintah. Sebagai akibat perbaikan ini, neraca transaksi berjalan diperkirakan masih mencatat surplus, walaupun cenderung menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, dan lalu lintas modal diperkirakan mencatat kenaikan surplus. Penurunan surplus neraca transaksi berjalan terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan impor sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi. Lalu lintas modal (LLM) Pemerintah diperkirakan akan mencatat surplus pada triwulan II-2005 terkait dengan mulai direalisasikannya *debt moratorium* hasil Paris Club. Sementara itu, di sisi LLM swasta juga mencatat surplus karena aliran modal dalam bentuk *portfolio investment* masih akan masuk. Secara keseluruhan, NPI diperkirakan akan mengalami surplus dan cadangan devisa meningkat.

V.2 Perkiraan Inflasi

Pada triwulan II-2005, pasca kenaikan harga BBM, laju inflasi IHK diperkirakan melambat meskipun masih berada pada tingkat yang tinggi. Berbeda dengan perkiraan laju inflasi IHK, inflasi inti diperkirakan akan meningkat dibandingkan dengan triwulan pertama 2005. Dari sisi fundamental, tekanan inflasi terutama berasal dari nilai tukar yang masih berada pada tingkat yang tinggi. Sementara itu, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, potensi tekanan inflasi yang berasal dari interaksi antara permintaan dan penawaran sudah muncul.

Dari faktor non fundamental, tekanan inflasi terutama bersumber dari perkiraan kenaikan *administered prices* seperti tarif dasar listrik (TDL) dan transportasi.

V.3. Perkiraan Nilai Tukar

Pada triwulan II-2005 nilai tukar rupiah secara bertahap diharapkan akan menguat kembali. Di satu sisi, permintaan valas diperkirakan akan meningkat terkait dengan pemulihan kegiatan ekonomi, kenaikan harga minyak dunia, percepatan pembayaran ULN oleh swasta, dan terjadinya pembalikan aliran modal asing secara terbatas. Di sisi lain, pasokan valas diperkirakan akan mengalami peningkatan terutama terkait dengan aliran modal asing dalam bentuk investasi portofolio dan penanaman modal langsung.

VI. ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN

Memperhatikan prospek ekonomi-moneter ke depan khususnya pencapaian sasaran inflasi jangka menengah serta faktor risiko yang berpotensi memberikan tekanan pada kestabilan ekonomi, dalam triwulan mendatang arah kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran sebagai berikut :

Di bidang moneter, mempertimbangkan perkiraan makroekonomi dan inflasi ke depan, langkah kebijakan Bank Indonesia akan tetap diarahkan untuk mempertahankan kestabilan makroekonomi guna memelihara momentum pertumbuhan ekonomi yang ada. Terkait dengan itu, kebijakan moneter yang cenderung ketat (*tight bias*) akan dilanjutkan guna mengendalikan tekanan inflasi. Secara operasional, kebijakan tersebut ditempuh dengan melakukan penyerapan kelebihan likuiditas secara optimal yang karenanya memungkinkan kenaikan suku bunga secara bertahap dan terukur. Selain itu, untuk mendukung terpeliharanya kestabilan ekonomi ke depan, Bank Indonesia terus melakukan berbagai upaya antisipatif terhadap beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi makro khususnya nilai tukar dan inflasi. Untuk menjaga volatilitas nilai tukar rupiah, langkah sterilisasi/intervensi valas akan dilakukan secara terukur.

Di bidang perbankan, kebijakan triwulan mendatang tetap diarahkan melanjutkan berbagai kebijakan untuk mempertahankan stabilitas sistem perbankan dan melanjutkan upaya-upaya untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan. Bank Indonesia akan mendorong perbankan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko serta membenahi *corporate governance*-nya untuk meminimalkan risiko-risiko usahanya. Untuk memperkuat struktur dan ketahanan sistem perbankan, Bank Indonesia akan

mendorong akselerasi proses konsolidasi industri perbankan melalui penyelesaian proses konsolidasi individual bank dalam tahun 2005. Dalam rangka penguatan jaring pengaman keuangan, Pemerintah dan Bank Indonesia berkoordinasi dan bekerjasama untuk menyiapkan pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khususnya dalam penyiapan peraturan pelaksanaan dan sosialisasi kepada perbankan dan masyarakat.

Di bidang sistem pembayaran tunai, kebijakan triwulan mendatang tetap diarahkan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia akan melakukan perencanaan kebutuhan masyarakat atas uang kartal serta pemantauan distribusi dan kecukupan persediaan kas. Di samping itu, langkah-langkah penanggulangan uang palsu tetap dilanjutkan antara lain melalui perluasan jejaring dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait serta meningkatkan publikasi dalam rangka pengenalan masyarakat atas ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui media elektronik dan media cetak serta penanganan operasional perkasan di wilayah bencana alam khususnya di KBI Banda Aceh.

Di bidang sistem pembayaran non tunai, kebijakan triwulan mendatang tetap diarahkan untuk melanjutkan upaya-upaya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran demi terciptanya sistem pembayaran nasional yang efisien, cepat, aman, dan handal guna mendukung kestabilan sistem moneter dan sistem keuangan. Hal tersebut dilakukan melalui langkah-langkah lanjutan dalam upaya meminimalkan risiko, meningkatkan efisiensi serta kehandalan sistem pembayaran dan perlindungan konsumen bagi pengguna jasa sistem pembayaran. Dalam periode ke depan, Bank Indonesia akan melanjutkan implementasi beberapa program yang telah disusun pada tahun 2004 dan penyusunan ketentuan antara lain pelaksanaan *Failure to Settle*(FtS), Sistem Kliring Nasional (SKN), pelaksanaan pengawasan sistem pembayaran dengan menggunakan kartu dan sosialisasi untuk memperlancar implementasi Daftar Hitam Nasional.

halaman ini sengaja dikosongkan